

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya Relasi kuasa dalam kasus tambang minyak ini terjadi karena faktor peralihan mata pencaharian dari petani karet atau sawit ke penambang minyak dikarenakan ketersediaan lahan pertanian tidak sesuai dengan mayoritas mata pencaharian penduduk .Kecamatan Keluang sebagai pengelola lahan pertanian yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian di Kecamatan Keluang. Oleh sebab itu masyarakat Keluang lebih memilih beralih profesi sebagai mengelola sumur minyak dibandingkan berprofesi sebagai petani, sumur minyak tersebut dikelola warga sekitar secara swadaya dengan cara tradisional hal tersebut dinilai masyarakat Keluang lebih menjanjikan dibandingkan dengan sebagai petani karet yang penghasilnya masih dipengaruhi oleh faktor cuaca dan monopoli harga karet.

Biaya pembuatan satu sumur dan biaya operasional tambang yang tidak murah membuat penambang menjalin relasi antar penambang dan ditambah lagi dengan status ilegal penambangan minyak ini akhirnya harus melibatkan aktor dari pejabat publik guna kepentingan tetap bertahannya tambang minyak di Kecamatan Keluang. Karena jabatan disini dipandang sebagai sumber kekayaan dan penghasilan.

Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal diKecamatan Keluang termasuk dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang minyak dapat dikatakan sebagai kelompok bisnis yang berupaya mengajak pejabat untuk

join/gandengan atau dalam istilah lain berkenan menanam saham dalam kegiatan tambang minyak ilegal tersebut.

Sementara dari pihak pejabat, mereka memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Sehingga dalam praktiknya mereka berperan sebagai koordinator melalui penyalur informasi dan sebagai keamanan. Maksud dari penyalur informasi adalah mereka membocorkan informasi kepada penambang apabila akan diadakan jadwal razia sehingga ketika pada saat jadwal razia tersebut para penambang tidak berada dilokasi tambang. Fungsi keamanan disini bukanlah arti keamanan yang sesungguhnya melainkan agar membiarkan mobil-mobil yang biasa masuk membeli minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.

B. Saran

1. Peneliti

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal penulisan dan dalam hal observasi atau penelitian. Peneliti atau penulis seperti halnya manusia biasa memiliki keterbatasan dan kekurangan karna itu masih ada beberapa poin dalam penelitian ini yang belum bisa peneliti ungkap dan uraikan karena peneliti memiliki kendala tidak dapat menjangkau lebih jauh untuk mencari data ke instansi terkait seperti Kapolsek Keluang, beberapa responden telah memperingatkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang sensitif. Karena itu peneliti memilih untuk menghentikan pengumpulan data. Akan tetapi data yang diperoleh peneliti rasa sudah cukup untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

2. Penelitian Selanjutnya

Penelitian tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang ini masih dapat dikaji lebih dalam lagi berkenaan tentang siapa aktor-aktor dari kepolisian yang bermain dalam kasus ini, yang dapat dikaji pula dengan prespektif yang berbeda untuk menguraikan dan menjelaskan siapa aktor-aktor yang bermain dalam permasalahan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

3. Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi kasus tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang karena pada dasarnya permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang mendasar bagi setiap orang. Kehadiran tambang minyak ilegal ini merupakan suatu bukti bahwa tidak dijalankannya fungsi pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat Keluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. 2008. Departemen RI.
- As'ad, M. Uhaib. 2016. Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik. *Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan*, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Vol. 1, No. 1, 34-41.
- Budi Santoso, Priyo. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- DWI ANANTA, DICKY. 2016. Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014, Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inskripena), Jakarta Selatan, JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS, 101-135.
- Eka Suaib dan La Husen Zuada. 2015. *Fenomena 'Bosisme Lokal' Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara*, Dosen Universitas Halu Oleo, Kendari. Volume 12 No. 2, 51–69.
- Fauziah, Dona. 2017. Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru, (Volume 4 No. 1 2017). 1-15.

- Hidayat, Syarif. 2001. Pola Hubungan Penguasa-Pengusaha: Studi Kasus di Jawa Barat dalam Nico L. Kana dkk (editor), *Dinamika Politik Lokal di Indonesia Salatiga*, Pustaka Percik.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- K. Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamahi, Umar. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, (*Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133), UMDA Kupang.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurjman, Asep. 2017. Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas. *Studi Kasus Timika Papua*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. 1069-1080.
- Pratama, Sandy. 2018. Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan. *Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016*, Ilmu Politik FISIP UBB, Vol. 3, No. 1, 41-53.
- Rachbini, J Didik. 2001. Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Solihah, Ratnia. 2016. Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran ISSN 2502 - 9185, Vol. 1, No. 1, Maret, 41-52.
- Solissa, Marcelino. 2016. *Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku*, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, 160-169.
- Sugiono, 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: ALFABETA.
- Sutrisno, Muji. 2005. Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta, Kanisius.
- Utomo, Susilo. 2010. Politik dan Wirausaha Fenomena “Rent Seeking” dan “Client Businessmen” pada Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Demak Jawa-Tengah, Fisip – Undip Semarang.
- Wijayanto. 2009. KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- zalpa, Yulion. 2016. Berburu Rente di Tambang Emas Hitam: Relasi Kuasa Antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Dalam Bisnis Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat. Dalam *Tesis Pascasarjana Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada*. (Tidak di Terbitkan).